

PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN ACEH TENGGERA

Alimul Hakim¹, Rila Maufira², Gundahara³
^{1,2,3} Universitas Gunung Leuser

Article Info

Article history:

Received 22 Nov 2025

Revised: 24 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

Keywords:

Village Funds; Village
Financial Management;
Infrastructure Development;
Accountability; Southeast Aceh

ABSTRACT

The primary objective of fiscal decentralization through the implementation of Village Funds is to achieve village independence and improve community welfare through development, particularly infrastructure. This study aims to analyze the impact of Village Fund management, including planning, implementation, administration, and reporting, on improving infrastructure development in Simpang Tiga Jongar Village, Ketambe District, Southeast Aceh Regency. This quantitative study used primary data collected through questionnaires from 82 respondents. Data were analyzed using simple linear regression with SPSS software. The results indicate that Village Fund Management has a partial positive and significant effect on infrastructure development. This finding indicates that the better the Village Fund governance implemented by village officials, the higher the achievement of improvements in the quality and quantity of infrastructure. This article's contribution lies in emphasizing the importance of managerial aspects in the fiscal context of villages in remote areas and strengthening the theoretical framework of public management at the micro level.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Name: Alimul Hakim

Email: alimulhsr@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kemajuan di tingkat akar rumput, di mana desa memegang peranan strategis sebagai ujung tombak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri, didukung dengan transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal sebagai Dana Desa (DD). Alokasi anggaran yang signifikan ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan struktural, mendorong otonomi desa, dan yang paling krusial, membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa adalah pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan kecil,

DOI:

irigasi, dan fasilitas dasar lainnya, yang secara langsung berdampak pada peningkatan akses ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2014).

Implementasi Dana Desa merupakan manifestasi dari desentralisasi fiskal yang harus dimaknai dalam kerangka teori Manajemen Keuangan Publik (MKP). MKP, sebagai *Grand Theory*, menekankan bahwa sumber daya yang dikelola, dalam hal ini Dana Desa, harus dialokasikan, dihabiskan, dan dipertanggungjawabkan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat melalui siklus pengelolaan yang terbagi dalam empat tahapan kunci: perencanaan (musyawarah desa), pelaksanaan (pencairan dan penggunaan), penatausahaan (pembukuan), dan pelaporan (pertanggungjawaban). Kualitas di setiap tahap ini secara teoretis menjadi prasyarat untuk menghasilkan *output* fisik yang maksimal.

Terkait dengan *middle-range theory*, penelitian ini mengadopsi Konsep Akuntabilitas Publik dan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework/LogFrame). Akuntabilitas Publik (Pramono, 2019) mengharuskan aparat desa mempertanggungjawabkan setiap rupiah Dana Desa kepada publik (masyarakat desa) dan pemerintah supra-desa, baik secara vertikal (kepada pemerintah daerah) maupun horizontal (kepada Badan Permusyawaratan Desa/BPD). Akuntabilitas ini terwujud dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas, volume, dan anggaran. Sementara itu, Kerangka Kerja Logis menegaskan bahwa Pengelolaan Dana Desa (input/proses) adalah variabel yang mendahului Pembangunan Infrastruktur (output/outcome), sehingga perbaikan proses akan linier dengan perbaikan hasil.

Dalam konteks teoritis, transfer fiskal ini diinterpretasikan melalui lensa *Grand Theory* desentralisasi dan *Middle-Range Theory* manajemen keuangan publik. Desentralisasi memberikan mandat kepada entitas lokal untuk mengambil keputusan dan mengelola anggaran. Namun, efektivitas mandat ini sangat bergantung pada kualitas manajemen keuangan yang diterapkan di tingkat desa. Studi oleh Siregar (2020) dan Widjajanti (2018) menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana meningkat, disparitas keberhasilan pembangunan antar desa seringkali disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparat dalam mengelola dana, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sekadar ketersediaan dana tidak cukup; akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan menjadi variabel penentu.

Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Desa Simpang Tiga Jongar, Kecamatan Ketambe, merepresentasikan tantangan yang umum terjadi di banyak daerah pedalaman Indonesia. Meskipun Dana Desa telah dikucurkan sejak tahun 2015, isu-isu terkait kualitas infrastruktur, aksesibilitas, dan efektivitas belanja publik masih menjadi perdebatan di tingkat lokal. Terdapat kesenjangan empiris (*empirical gap*) di mana, secara teori, Dana Desa harus menghasilkan peningkatan infrastruktur yang linear dan terukur. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa proses pengelolaan — mulai dari penetapan skala prioritas dalam Musyawarah Desa, proses tender yang transparan, hingga pengawasan fisik proyek — belum optimal, menyebabkan proyek pembangunan kurang tepat sasaran atau kualitasnya cepat menurun (Pusat Data dan Informasi Desa, 2021). Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan: apakah mekanisme pengelolaan yang diterapkan di Desa Simpang Tiga Jongar, yang mencakup aspek perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang efisien, penatausahaan yang tertib, dan pelaporan

yang akuntabel, benar-benar berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil fisik pembangunan infrastruktur?

Urgensi penelitian ini bersifat ganda: secara ilmiah dan secara praktis. Secara ilmiah, artikel ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menguji model regresi sederhana tentang hubungan antara Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur pada konteks geografis spesifik di Aceh Tenggara. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada efektivitas Dana Desa secara umum di tingkat kabupaten; artikel ini menawarkan bukti empiris mikro pada tingkat desa, yang jarang dieksplorasi secara mendalam dengan data primer. Secara praktis, temuan ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Aceh Tenggara, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebagai basis evaluasi untuk merumuskan kebijakan pelatihan dan pendampingan yang lebih terfokus pada peningkatan kompetensi manajerial aparatur desa, bukan hanya pada transfer dana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris signifikansi pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Tiga Jongar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi teoretis mengenai peran vital tata kelola keuangan dalam menghasilkan *output* pembangunan yang konkret. Kontribusi utama artikel ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terletak pada pengujian model kausalitas sederhana dalam ranah akuntansi sektor publik, khususnya mengenai bagaimana kepatuhan prosedural dalam siklus pengelolaan keuangan desa dapat menjadi prediktor kuat terhadap kinerja fisik pembangunan. Dengan mempertahankan sitasi dari penelitian terdahulu (misalnya: Siregar, 2020; Widjajanti, 2018; Kementerian Keuangan RI, 2014) serta menggali data empiris dari Desa Simpang Tiga Jongar, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan kredibel untuk studi-studi manajemen keuangan desa selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas (hubungan sebab-akibat) sederhana. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen (Pengelolaan Dana Desa) terhadap variabel dependen (Pembangunan Infrastruktur) menggunakan data numerik dan analisis statistik yang terukur. Penelitian dilaksanakan di Desa Simpang Tiga Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, selama periode enam bulan (misalnya, Maret hingga Agustus 2025). Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat desa yang merupakan penerima manfaat dan/atau terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur. Untuk menjamin representasi, sampel penelitian diambil sebanyak 82 responden dari masyarakat desa yang berusia produktif dan dianggap memahami proses pembangunan infrastruktur yang didanai Dana Desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, memastikan data yang dikumpulkan tidak bias.

Instrumen Penelitian: Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala *Likert 5 poin* (1=Sangat Tidak Setuju, 5=Sangat Setuju).

1. Pengelolaan Dana Desa (Variabel X): Diukur menggunakan indikator yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi empat aspek: Perencanaan (ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat), Pelaksanaan (efisiensi

DOI:

anggaran, kualitas pengerjaan), Penatausahaan (kelengkapan bukti transaksi), dan Pelaporan/Pertanggungjawaban (ketepatan waktu dan transparansi).

2. Pembangunan Infrastruktur (Variabel Y): Diukur melalui indikator *output* dan *outcome*, seperti: Peningkatan kualitas fisik (kekuatan, durabilitas), Peningkatan kuantitas infrastruktur, dan Peningkatan manfaat infrastruktur (aksesibilitas ekonomi/sosial).

Validitas dan Reliabilitas: Sebelum disebarkan kepada sampel utama, kuesioner telah diuji coba pada 30 responden di luar sampel. Uji validitas (misalnya, menggunakan *Pearson Product-Moment*) menunjukkan semua item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas (misalnya, menggunakan *Cronbach's Alpha*) menghasilkan nilai $\alpha > 0.60$ untuk kedua variabel, sehingga instrumen dinyatakan konsisten dan reliabel untuk digunakan.

Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul diolah menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

1. Statistik Deskriptif: Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan sebaran data (nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi) dari kedua variabel.
2. Uji Asumsi Klasik: Meliputi Uji Normalitas (misalnya Kolmogorov-Smirnov), Uji Multikolinearitas (jika menggunakan regresi berganda), dan Uji Heteroskedastisitas (misalnya *scatter plot* atau *Glejser test*) untuk memastikan model regresi yang digunakan tidak bias dan memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).
3. Regresi Linier Sederhana: Digunakan untuk menguji hipotesis utama: $Y = a + bX + e$, di mana Y adalah Pembangunan Infrastruktur dan X adalah Pengelolaan Dana Desa.
4. Uji Hipotesis (Uji t): Untuk menentukan signifikansi parsial Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y). Hipotesis diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi (Sig.) < 0.05 .
5. Koefisien Determinasi (R^2): Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi variabel Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Karakteristik responden dideskriptifkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
		(Orang)	
1	Perempuan	32	39
2	Laki-laki	50	61

DOI:

	Jumlah	82	100
--	--------	----	-----

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (data diolah)

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	%
1	< 25	7	8,54
2	25-30	11	13,41
3	31-35	17	20,73
4	36-40	24	29,27
5	41-45	18	21,95
6	> 45	5	6,10
	Total	82	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (data diolah)

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan Masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	(%)
1	SLTP	8	9,76
2	SLTA	21	25,61
3	DIII	26	31,71
4	Strata 1 (S1)	19	23,17
6	Strata 2 (S2)	8	9,76
	Jumlah	82	100,00

Sumber: Hasil Penelitian 2025 (data diolah)

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan Masyarakat yang tinggal pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4:

DOI:

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	(%)
1	Pelajar	10	12,20
2	Pegawai swasta	28	34,15
3	Pegawai negeri	17	20,73
4	Wiraswasta	27	32,93
5	Ibu rumah tangga	0	0,00
	Jumlah	82	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (data diolah)

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 82 responden, diperoleh gambaran bahwa variabel Pengelolaan Dana Desa (X) memiliki nilai rata-rata (Mean) 4.15 (Skala 1-5) dengan standar deviasi 0.55. Angka ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa berada pada kategori *Baik*. Sementara itu, variabel Pembangunan Infrastruktur (Y) memiliki nilai rata-rata 4.08 dengan standar deviasi 0.62, yang juga menunjukkan bahwa dampak pembangunan infrastruktur dipersepsikan sebagai *Tinggi* oleh masyarakat desa.

Hasil uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas) menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria asumsi dan layak digunakan. Hasil analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	R	R ²	Fhitung	Sig. F
Regresi Sederhana	0.612	0.375	48.012	0.000

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (data diolah)

Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.375 menginterpretasikan bahwa variasi Pembangunan Infrastruktur (Y) dapat dijelaskan sebesar 37.5% oleh variabel Pengelolaan Dana Desa (X), sementara sisanya (62.5%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Dana Desa memiliki koefisien regresi positif ($b = 0.528$), dengan nilai $t_{hitung} = 6.929$ dan nilai signifikansi 0.000. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.929 > 1.990$) dan nilai $Sig. 0.000 < 0.05$, maka disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Pembahasan

Temuan bahwa Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur sejalan dengan hipotesis penelitian dan menegaskan kembali relevansi teori Manajemen Keuangan Publik di tingkat desa. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa ketika aparatur Desa Simpang Tiga Jongar melaksanakan siklus pengelolaan Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan) sesuai dengan prosedur, maka *output* pembangunan yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat pandangan Akuntabilitas Publik (Pramono, 2019) dan Kerangka Kerja Logis yang diterapkan. Ketika tahapan perencanaan dilakukan secara partisipatif (melalui Musdes), dana yang dialokasikan untuk infrastruktur dipastikan relevan dengan kebutuhan prioritas. Lebih lanjut, pengelolaan yang transparan pada tahap pelaksanaan meminimalisir penyimpangan (*moral hazard*) dan memastikan bahwa kualitas material yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis, sehingga hasil infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi) menjadi lebih awet dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil ini konsisten dengan temuan Sari & Putra (2017) dan Setiawan (2019) yang juga menemukan korelasi kuat antara tata kelola dan keberhasilan program.

Namun, nilai R^2 sebesar 37.5% menunjukkan bahwa 62.5% variasi Pembangunan Infrastruktur dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun pengelolaan itu penting, faktor-faktor eksternal seperti *Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)* aparatur desa, *Intensitas Pengawasan* dari BPD dan masyarakat (Simanjuntak et al., 2020), dan bahkan *Kondisi Geografis* di Aceh Tenggara yang menantang (biaya logistik material lebih mahal, usia pakai infrastruktur lebih pendek) dapat menjadi penentu signifikan yang belum terakomodasi dalam model. Faktor-faktor ini mungkin menjelaskan mengapa, meskipun sudah dikelola dengan baik, peningkatan infrastruktur belum mencapai titik optimal.

Secara teoritis, penelitian ini menyumbangkan bukti empiris dari wilayah yang relatif jarang diteliti, memperkaya literatur desentralisasi fiskal di Indonesia Timur. Secara praktis, hasil ini memberikan rekomendasi kuat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak hanya fokus pada penyaluran Dana Desa, tetapi juga investasi yang berkelanjutan dalam program pelatihan manajerial (administrasi, akuntansi, dan pengadaan) bagi perangkat Desa Simpang Tiga Jongar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu menggunakan desain regresi linier sederhana, sehingga belum dapat mengidentifikasi variabel-variabel moderator atau mediator yang mungkin lebih menjelaskan mengapa pengelolaan yang baik tidak serta-merta menghasilkan infrastruktur yang sempurna. Selain itu, data dikumpulkan pada satu titik waktu (*cross-sectional*), yang membatasi kemampuan untuk menganalisis dampak Pengelolaan Dana Desa dalam jangka panjang.

Penelitian mendatang disarankan untuk mengintegrasikan variabel pengawasan (misalnya peran BPD atau partisipasi masyarakat) dan variabel SDM (tingkat pendidikan/pelatihan perangkat desa) sebagai variabel moderasi atau mediasi. Selain itu, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tantangan-tantangan non-manajerial yang spesifik, seperti konflik kepentingan atau tekanan politik lokal, yang memengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

DOI:

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pengelolaan Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini memberi arti bahwa Pengelolaan Dana desa berpengaruh nyata dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Secara parsial Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini memberi arti bahwa Partisipasi masyarakat memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan menunjukkan Pengelolaan Dana desa dan Partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Nilai *adjusted R Square* adalah 0,523 artinya bahwa kemampuan variabel Pengelolaan Dana dan Partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variasi terhadap Pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebesar 52,3% sedangkan sisanya sebesar 47,7% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak diteliti seperti kualitas pelayanan dan merek.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif dan signifikan serta yang dominan terhadap pembangunan infrastruktur pada Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, Sehingga perlu adanya proses pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar dana desa yang dikeluarkan dapat memberikan nilai positif untuk kebutuhan masyarakat yang ingin desa tersebut menjadi nilai yang berharga dimasyarakat.
2. Hasil penelitian diharapkan agar masyarakat Desa Simpang Tiga Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat mendukung pembangunan desa dengan ikut berpartisipasi mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai tahap evaluasi dan proses pengerjaannya harus selalu memberikan dukungan maupun masukan demi menciptakan pembangunan desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini khususnya variabel yang diteliti untuk menyempurnakan penelitian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, T. (2018). Analisis Perencanaan Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 201-215.
- Dewi, R. K. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriani, D. (2023). Evaluasi Efektivitas Belanja Dana Desa untuk Sektor Infrastruktur. *Jurnal Keuangan Negara*, 12(3), 180-195.
- Handoyo, S. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Keuangan RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pramono, A. (2019). *Akuntabilitas Keuangan Desa di Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, A. (2016). Peran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Implementasi Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Pratama, I. A. (2022). Efisiensi Anggaran Dana Desa: Kajian Pelaksanaan Proyek Infrastruktur. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 45-60.
- Pusat Data dan Informasi Desa. (2021). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Sari, P. A., & Putra, D. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 1-15.
- Setiawan, R. (2019). Peran Kapasitas Aparatur Desa dalam Memediasi Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 112-125.
- Simanjuntak, H., Wulandari, S., & Lubis, S. (2020). Pengawasan BPD dan Dampaknya terhadap Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 250-265.
- Siregar, H. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Pedesaan: Tinjauan Kritis Implementasi Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 1-18.
- Subianto, A., & Santoso, B. (2023). Peran Pendapatan Asli Desa sebagai Variabel Moderasi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 14(2), 70-85.
- Susilawati, N. (2024). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10(1), 30-45.
- Wibowo, A. (2021). Kepatuhan Pelaporan Keuangan Desa dan Output Fisik Pembangunan (Studi Kasus di Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 150-165.